

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN
DAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT PERIODE BULAN JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020

I. DASAR KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
7. Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor ST.2547/DJPL/2020 tanggal 24 November 2020

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari/Tanggal : Senin, 14 Desember 2020 s.d. Jumat, 18 Desember 2020
Lokasi : Hotel D'Anaya Bogor

III. PESERTA KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 14 (empat belas) peserta yang terdiri dari :

Bagian Kepegawaian : 11 (sebelas) orang
Bagian Keuangan : 2 (dua) orang
Bagian Umum dan Perlengkapan : 1 (satu) orang

IV. HASIL KEGIATAN

1. Peserta kegiatan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin dan kasus-kasus kepegawaian lainnya yang dilaporkan, diproses dan/atau diselesaikan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020;

/2. Kasus

2. Kasus pelanggaran disiplin dan kasus-kasus kepegawaian lain yang dilaporkan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS
1	Tidak masuk kerja	4
2	Permohonan izin/surat keterangan melakukan perceraian	15
3	Hidup bersama dengan wanita/pria yang bukan istri/suaminya tanpa ikatan perkawinan yang sah	1
4	Perceraian tanpa izin	2
5	Beristri lebih dari satu tanpa izin	0
6	PNS Wanita menjadi istri kedua	0
7	Pemberhentian atas permintaan sendiri	2
8	Tindak Pidana	0
9	Pelanggaran terhadap martabat PNS	0
JUMLAH		24

3. Kasus pelanggaran disiplin dan kasus-kasus kepegawaian lain yang telah selesai pada periode bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS SK	JUMLAH KASUS
1	Teguran Lisan	0
2	Teguran Tertulis	0
3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	0
4	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun	0
5	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun	0
6	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun	19
7	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun	4
8	Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri	2
9	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	2
10	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	0
11	Izin/Surat Keterangan Melakukan Perceraian	4
12	Penolakan Izin Melakukan Perceraian	2
13	Pemberhentian Sementara	0
JUMLAH		33

V. TINDAK LANJUT

Sehubungan dengan hasil laporan kasus di atas, akan dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Terhadap pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian yang menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, akan dilakukan koordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan agar segera menindaklanjuti kasus-kasus yang belum selesai dan belum diterbitkan Keputusan hukuman disiplinya;
2. Penanganan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian lainnya yang masih menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan ke lokasi atau melalui media elektronik (*teleconference*) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

VI. PENUTUP

Demikian berita acara kegiatan evaluasi, penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan penanganan disiplin Pegawai Negeri Sipil periode bulan Juli sampai dengan Desember 2020 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 18 Desember 2020

Mengetahui,


D'ARYA
Bogor
Ade Maysari